



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	18 (delapan belas)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Hari, Tanggal	:	Kamis, 9 September 2021
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Faisol Riza, S.S Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Penjelasan terhadap usulan tambahan PMN TA 2021
Hadir	:	1. 45 orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. a. Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero); b. Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; c. Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. d. Bapak/Ibu pendamping yang sudah bergabung di virtual beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. pada pukul 10.44 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada hari Kamis, 9 September 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza, S.S.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), mengenai usulan Penyertaan Modal Negara tunai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.200.000.000.000,- (*Satu Trilyun Dua Ratus Milyar Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pendanaan Penguatan industri pangan dan peningkatan inklusifitas petani, peternak, nelayan, dan UMKM dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Produksi Benih, Gabah dan Beras Petani sebesar Rp.299.000.000.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Rupiah*)
 - b. *Offtake* Hasil Produksi *Food Estate* sebesar Rp.300.000.000.000,- (*Tiga Ratus Milyar Rupiah*)
 - c. Penambahan sarana pasca panen *Food Estate* sebesar Rp.50.000.000.000,- (*Lima Puluh Milyar Rupiah*)
 - d. *Offtake* tebu/gula petani sebesar Rp.225.000.000.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*)
 - e. Peningkatan kemitraan dan *Offtake* hasil produksi nelayan sebesar Rp.57.000.000.000,- (*Lima Puluh Tujuh Milyar Rupiah*)
 - f. Pengembangan industri pakan ikan sebesar Rp.97.000.000.000,- (*Sembilan Puluh Tujuh Milyar Rupiah*)
 - g. Perluasan saluran distribusi pangan (Warung Pangan) sebesar Rp.32.000.000.000,- (*Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah*)
 - h. Peningkatan produksi peternakan ayam sebesar Rp.100.000.000.000,- (*Seratus Milyar Rupiah*)
 - i. Peningkatan produksi garam sebesar Rp.40.000.000.000,- (*Empat Puluh Milyar Rupiah*)

2. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), mengenai usulan Penyertaan Modal Negara non-tunai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.608.988.000.000,- (*Dua Trilyun Enam Ratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pendanaan hutang Rekening Dana Investor/*Service Level Agreement* (RDI/SLA) dan Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) klaster pangan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hutang Pokok RDI/SLA sebesar Rp292.406.000.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Juta Rupiah*)
 - b. Hutang Non Pokok RDI/SLA (Bunga dan Denda) sebesar Rp1.706.939.000.000,- (*Satu Trilyun Tujuh Ratus Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*)

- c. Hutang Ex BPPN sebesar Rp609.653.000.000,- (*Enam Ratus Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*)
3. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., mengenai usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.000.000.000.000,- (*Tujuh Trilyun Rupiah*) yang akan digunakan untuk menambah permodalan inti dalam bentuk *Capital Adequacy Ratio (CAR)* maupun *tier 1*, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penguatan penyaluran kredit (memperluas fungsi intermediasi) salah satunya melalui peningkatan Batasan Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dengan adanya PMN ini diharapkan saham Negara pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., tetap mayoritas.
 4. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., mengenai usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.000.000.000.000,- (*Dua Trilyun Rupiah*) yang akan digunakan untuk menambah permodalan inti dalam bentuk *Capital Adequacy Ratio (CAR)* maupun *tier 1* dan dengan potensi tersebut, dalam 5 Tahun kedepan menargetkan realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebanyak 1.000.000 unit dan untuk merealisasikannya dibutuhkan tambahan modal yang akan dipenuhi melalui *Rights issue*. Dengan adanya PMN ini diharapkan saham Negara pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., tetap mayoritas.
 5. Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman terkait dengan usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
 6. Memberikan waktu kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi VI DPR RI secara tertulis.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.05 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

Faisol Riza, S.S.
A-33